



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

III. KEGIATAN RANHAM INDONESIA TAHUN 2011 – 2014

A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI RANHAM

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PEMBENTUKAN PANITIA RANHAM										
1	Belum terbentuknya Panitia RANHAM 2011-2014	Pembentukan Panitia RANHAM 2011-2014	Membentuk dan mengukuhkan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014	Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014	Terbentuknya Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014	V	-	-	-	Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2	Belum optimalnya pelaksanaan RANHAM 2004-2009	Peningkatan koordinasi Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali	1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM	Terlaksananya Program RANHAM 2011-2014 secara optimal	V	V	V	V	Panitia RANHAM Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Membentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Membentuk Pokja di setiap Kementerian/ Lembaga, dan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	2. Penetapan Pokja di setiap Kementerian/ Lembaga, dan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota						
PENGUATAN PANITIA RANHAM										
1	Masih lemahnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM	Peningkatan pemahaman Program RANHAM	1. Sosialisasi/ Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM 2. Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM	1. Terselenggaranya Sosialisasi/ Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM 2. Terselenggaranya Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM	Meningkatnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM	V	V	V	V	Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

B. PERSIAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

B. PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum efektifnya persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal	Peningkatan efektifitas persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal	1. Membentuk mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM 2. Membentuk Pokja Tetap persiapan pengesahan instrumen internasional HAM	1. Terbentuknya mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM 2. Terbentuknya Pokja Tetap Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM	Tersusunnya naskah akademik dan RUU instrumen internasional HAM yang akan disahkan meliputi : 1. Konvensi Penyandang Cacat 2. Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan	V	-	-	-	Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemen PU Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan

3. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Menyusun Naskah Akademik dan RUU oleh Pokja Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM 4. Sosialisasi muatan instrumen instrumen Internasional HAM yang akan disahkan	3. Tersusunnya Naskah Akademik dan RUU persiapan pengesahan instrumen HAM internasional 4. Tersosialisasinya instrumen HAM internasional yang akan disahkan	3. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 4. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi 5. Konvensi perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya	-	-	V	-	Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan, Kemensos, MABES TNI Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemennakertrans Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemen dagri, BNP2TKI

6. Protokol ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak	V	-	-	-	Kemenlu, Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemdiknas, Kemensos
					7. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan	-	V	-	-	Kemenlu, Kemenkumham, Kemen PP & PA
					8. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata	V	-	-	-	Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kepolisian, Kejaksaan, Kemen PP & PA, Kemensos

9. Konvensi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9. Konvensi Status Pengungsi	-	-	-	V	Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos
					10. Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi	-	-	-	V	Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos
					11. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida	-	-	-	V	Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan
					12. Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa	-	-	-	V	Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, MABES TNI, Kepolisian

C. HARMONISASI ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

C. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM	Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berperspektif HAM	1. Menyiapkan parameter HAM untuk harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan 2. Membentuk Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan	1. Tersusunnya parameter HAM untuk harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan 2. Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif	1. Terlaksananya harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berperspektif HAM 2. Rekomendasi adanya peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			<p>3. Melaksanakan sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Melaksanakan evaluasi peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM</p>	<p>3. Terlaksananya sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Rancangan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM</p> <p>5. Tersusunnya informasi peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM</p>						

2. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih	Penyelarasan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 2. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 3. Menyusun dan menelaraskan peraturan perundang-undangan 4. Meningkatkan koordinasi Panitia RANHAM dengan <i>Law Centre</i> Kemenkumham 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terinventarisasinya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 2. Tersusunnya hasil kajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 3. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang serasi dan selaras 4. Meningkatnya koordinasi Panitia RANHAM dengan <i>Law Centre</i> Kemenkumham 	Peraturan perundang-undangan yang serasi dan selaras	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemen LH, Kemen ESDM, Kemenhut, Kemendagri, Kemen KP, Kementan, Kemen PU, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

D. PENDIDIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

D. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HAM	Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat2. Melaksanakan diseminasi dan pelatihan HAM berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat2. Terlaksananya diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemendiknas, LAN, Kemenag, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendagri, KOMNAS HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			3. Melaksanakan pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/ penyuluh pelatihan HAM bagi aparaturn pemerintah dan masyarakat	3. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/ penyuluh pelatihan HAM bagi aparaturn pemerintah dan masyarakat						
2	Masih terbatasnya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan ajar serta penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan 2. Menganekaragamkan metodologi HAM di lingkungan pendidikan	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan 2. Meningkatnya penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan	Terpenuhinya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan	V	V	V	V	

3. Belum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Belum semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM	Penguatan materi HAM pada kurikulum pendidikan kepemimpinan teknis, dan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional Melaksanakan pendidikan HAM bagi Widyaiswara 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional Terlaksananya pendidikan HAM bagi Widyaiswara 	Semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM	V	V	V	V	Kemendiknas, LAN, Kemenkumham, Kemenag, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4	Belum optimalnya peran media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	Peningkatan peran lembaga/ instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan HAM	Melakukan pembudayaan HAM melalui peran lembaga/instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional	Terlaksananya pembudayaan HAM melalui peran lembaga/ instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional	Meningkatnya peran lembaga/instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenbudpar, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

E. PENERAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

E. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. HAK UNTUK HIDUP										
1	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan	Peningkatan taraf hidup ibu hamil	1. Meningkatkan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil dari keluarga miskin 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, pada saat dan setelah melahirkan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Rumah Sakit oleh tenaga-tenaga yang profesional dan didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatnya pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil dari keluarga miskin 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, pada saat dan setelah melahirkan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Rumah Sakit	Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran	V	V	V	V	Kemenkes, Kemensos, Kemen PP & PA, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>3. Meningkatkan target program vaksinasi tanpa dipungut biaya bagi bayi dan keluarga miskin</p> <p>4. Memberikan bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin</p> <p>5. Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>6. Sosialisasi tentang penanganan perinatal</p> <p>7. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang berkualitas (sesuai dengan SOP)</p>	<p>3. Meningkatnya program vaksinasi gratis bagi bayi dari keluarga miskin</p> <p>4. Terlaksananya bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin</p> <p>5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>6. Meningkatnya pengetahuan tentang penanganan perinatal</p> <p>7. Meningkatnya kesertaan KB bagi keluarga miskin</p>						

2. Terbatasnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibatkan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan.	Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan2. Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan2. Meningkatnya layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan	Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Menurunnya ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Menurunnya kualitas lingkungan yang mengancam perikehidupan dan makhluk hidup	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal 3. Menyusun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup	1. Terlaksananya bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Terlaksananya pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal 3. Tersusunnya panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup	Semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup	V	V	V	V	Kemenhut, Kemen LH, Kemendagri, Kemen ESDM, Kementan, Kemen BUMN, Kemen KP, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Melanjutkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Melanjutkan pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan 5. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat	4. Terlaksananya pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan 5. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat						

4. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih Melaksanakan pengawasan dan meningkatkan peran posko pengaduan lingkungan hidup dan sumber daya alam 	<ol style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya dan tersusunnya hasil kajian peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam 	Meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga masyarakat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat	V	V	V	V	Kemen LH Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>3. Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>4. Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam</p>	<p>3. Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>4. Terlaksananya tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam</p>						

5. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Masih belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	Peningkatan fasilitas umum yang menunjang terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat	Membangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum	Tersedianya fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum	Terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	V	V	V	V	Kemen LH Kemen PU, Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN										
1	Masih adanya kendala untuk melangsungkan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin	Kemudahan melangsungkan perkawinan yang sah, memperoleh surat nikah dan akta kelahiran bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin secara gratis	1. Melakukan pendataan gelandangan, pengemis dan orang miskin 2. Memberikan KTP gratis pada gelandangan, pengemis, dan orang miskin	1. Adanya data gelandangan, pengemis, dan orang miskin yang tidak mempunyai KTP 2. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh KTP gratis	Terpenuhinya hak bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin memperoleh surat/akta nikah dan akta kelahiran	V	V	V	V	Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>3. Melaksanakan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis</p> <p>4. Pemberian surat/akta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p> <p>5. Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p>	<p>3. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis</p> <p>4. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis</p> <p>5. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis</p>						

2. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih banyaknya perkawinan yang belum dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan yang mengakibatkan isteri dan anaknya tidak mendapatkan perlindungan hukum	1. Peningkatan pemahaman tentang syarat perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan 2. Peningkatan perlindungan hukum bagi isteri dan anak	1. Sosialisasi tentang perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang perkawinannya belum dicatatkan 3. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	1. Meningkatnya pemahaman tentang perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2. Terlaksananya pencatatan setiap perkawinan 3. Tersusunnya Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Terpenuhinya pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan	V	V	V	V	Kemenag, Kemendagri Kemendagri, Kemen PP & PA, Kemen PAN & RB, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. HAK ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI										
1	Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar	Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar	1. Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3. Mendorong Pemda untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya	1. Tersedianya data warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3. Tersusun dan terlaksananya kebijakan Pemda tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya	Terpenuhinya pendidikan dasar bagi warga masyarakat termasuk anak usia sekolah tanpa dipungut biaya	V	V	V	V	Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemensos, Kemen PDT, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih banyaknya warga masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan terutama karena faktor geografis (pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau terluar), dan/atau mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil	Membuka akses transportasi, komunikasi, dan informasi bagi warga masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan terutama karena faktor geografis, mengalami bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun prasarana dan menyediakan sarana transportasi di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau 2. Membangun jaringan informasi dan komunikasi menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya akses pendidikan bagi warga masyarakat terutama karena faktor geografis, bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil 2. Terbukanya akses jaringan informasi dan komunikasi menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 	Terpenuhinya hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan karena faktor geografis, bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil	V	V	V	V	Kemendiknas, Kemen PDT, Kemen PU, Kemenhub, Kemensos, Kemen KP, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Masih banyaknya warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan	Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Sosialisasi pentingnya pendidikan 2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1. Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan 2. Berfungsinya secara optimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	V	V	V	V	Kemendiknas, Kemenag, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos, Kemenkominfo, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN										
1	Terbatasnya Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	1. Penyusunan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum	1. Mempercepat Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang	1. Tersedianya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.	Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Setjen MA, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Pemerintah provinsi dan Kab/Kota

2. Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin	2. Meningkatkan pelaksanaan program Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	2. Meningkatnya pelaksanaan program Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin						
2	Masih adanya penerapan hukum pidana yang kurang mencerminkan keadilan	Pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadilan	1. Mendorong pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (<i>restorative justice</i>) dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius 2. Menerapkan hukum pidana (<i>criminal justice system</i>) yang mencerminkan keadilan	1. Terlaksananya <i>Restorative justice</i> sistem peradilan pidana 2. Terlaksananya hukum pidana (<i>criminal justice system</i>) yang mencerminkan keadilan	Penerapan hukum pidana yang mencerminkan keadilan.	V	V	V	V	Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

3. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Masih adanya aparat penegak hukum yang kurang memahami HAM	Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Terlaksananya sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum 	Semua aparat penegak hukum memahami HAM	V	V	V	V	Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota
4	Masih adanya penanganan perkara pidana yang belum mencerminkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan	Penanganan perkara pidana lebih cepat, sederhana dan biaya ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Mensosialisasikan SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Melaksanakan penanganan perkara pidana secara terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Terlaksananya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Terlaksananya penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan 	Terwujudnya penanganan perkara pidana yang menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpadu	V	V	V	V	Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

4. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Meningkatkan koordinasi Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di tingkat daerah	4. Meningkatnya koordinasi Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di tingkat daerah						
5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI										
1	Masih kurangnya pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	Peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	1. Melaksanakan sosialisasi tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.	1. Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya pemahaman tentang kebebasan beragama, beribadat, dan toleransi antar umat beragama/ kepercayaan lain	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama, dan toleransi antar umat beragama/ kepercayaan lain	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemenag, Kemenbudpar, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

2. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	112
			<p>2. Melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik.</p> <p>3. Meningkatkan Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta <i>focus group discussion (FGD)</i></p>	<p>2. Terlaksananya pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik</p> <p>3. Meningkatnya peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta <i>focus group discussion (FGD)</i></p>	<p>2. Berkurangnya konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama/ kepercayaan</p>					

6. HAK ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. HAK ATAS RASA AMAN										
1	Masih adanya tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum	Penghapusan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum	1. Sosialisasi UU No.5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia	1. Terlaksananya sosialisasi UU No.5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia	Berkurangnya tindak penyiksaan yang dialami masyarakat	V	V	V	V	Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2. Mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p> <p>3. Meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p>	<p>2. Menurunnya tingkat kekerasan dalam proses penegakan hukum</p> <p>3. Meningkatnya pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p>						

2. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih terjadinya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyebabkan terganggunya rasa aman	Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendidikan/sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat 2. Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) 3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendidikan/sosialisasi Hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat 2. Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) 3. Terciptanya/terbangunnya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa 	Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Kemendagri, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Mendorong Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat	4. Meningkatnya Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat						
3	Tingginya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan yang mengakibatkan konflik	Pembenahan sistem administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan	1. Legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan secara menyeluruh dan akurat 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam proses legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan 3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan	1. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan 2. Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan hak atas tanah termasuk di kawasan hutan 3. Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan	Berkurangnya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan	V	V	V	V	Kemendagri, BPN, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

7. HAK ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN										
1	Masih belum terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	Peningkatan pemenuhan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	Membangun sarana dan prasarana air bersih	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih	Terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Kemen PU, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2	Masih terbatasnya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat	Pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin	Memberikan kemudahan (kredit mudah, murah, dan tanpa agunan) bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat	Tersedianya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat	Tersedianya akses perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Kemenpera, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Masih rendahnya akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya	Peningkatan akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya	Meningkatkan pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal	Meningkatnya jumlah masyarakat lokal yang memperoleh konsesi pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hutan desa dan hutan tanaman rakyat	V	V	V	V	Kemehut, Kemen LH, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4	Masih rendahnya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan	Peningkatan akses nelayan dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal	1. Membangun fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	1. Tersedianya fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	Terpenuhinya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan	V	V	V	V	Kemen KP, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Meningkatkan langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal 3. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat	2. Meningkatnya langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal 3. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat						
5	Belum maksimalnya rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat	Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat	1. Melakukan pendataan atas jumlah dan jenis penyandang cacat	1. Tersedianya data jumlah dan jenis penyandang cacat	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	V	V	V	V	Kemensos, Kemen PU, Kemennakertrans, Kemenkes, Kemendiknas, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat3. Meningkatkan bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat4. Meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik5. Sosialisasi tentang kepedulian terhadap penyandang cacat (disabilitas)	<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatnya kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat3. Meningkatnya bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik5. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat (disabilitas)						

6. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Masih tingginya angka pengangguran	Penempatan, perluasan, dan pemanfaatan peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri 2. Menyempurnakan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah 3. Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri 2. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah 3. Tersedianya calon tenaga kerja yang terampil 	Menurunnya angka pengangguran	V	V	V	V	Kemennakertrans, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkop & UKM, BNP2TKI, Kemenperin, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Membuka ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah baik di sektor formal maupun informal	4. Tersedianya lapangan kerja di daerah						
7	Belum optimalnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	1. Meningkatkan fasilitasi dan perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya 2. Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI	1. Meningkatnya perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya 2. Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI	Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia	V	V	V	V	Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu, Kemendagri, BNP2TKI, Kepolisian, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 48 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 4. Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 5. Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima 6. Meningkatkan layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum	3. Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 4. Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 5. Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima 6. Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum						

7. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>7. Meningkatkan Sosialisasi tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban TKI</p> <p>8. Meningkatkan Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI</p>	<p>7. Meningkatnya pemahaman masyarakat/calon TKI tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman akan hak dan kewajibannya</p> <p>8. Meningkatnya Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI</p>						

8. Belum ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan masyarakat miskin Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya data masyarakat miskin Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas 	Terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Kemendes, BKKBN, Kemensos, BPS, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
9	Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin	Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin 	Terpenuhinya hak atas pangan yang meliputi kecukupan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Kementan, Kemen BUMN, Bappenas, Kemendagri, Kemenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 51 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3. Tersusunnya sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri						
10	Masih tingginya jumlah penambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat	Pengendalian pertumbuhan penduduk	1. Sosialisasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	1. Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	Kemendes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 52 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Meningkatkan persediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat 3. Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja	2. Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi 3. Menurunnya perkawinan usia dini						
11	Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses listrik	Peningkatan akses listrik bagi masyarakat	1. Melakukan pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik	1. Tersusunnya pemetaan daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup	Terpenuhinya akses listrik bagi masyarakat	V	V	V	V	Kemen ESDM, Kemen BUMN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3. Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin	2. Terpasangnya jaringan listrik dan meningkatnya daya listrik 3. Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin						
8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN										
	Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum	Penyempurnaan sistem data kependudukan yang akurat dan terkini	1. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan 2. Memberikan Kartu Tanda Penduduk gratis kepada penduduk	1. Terlaksanannya tertib administrasi kependudukan 2. Penduduk memperoleh KTP gratis	Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum	V	V	V	V	Kemendagri, BPS, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

9. HAK ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 54 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. HAK PEREMPUAN										
1	Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender	1. Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender 2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif gender	1. Penyusunan Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) 2. Melakukan sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan penyelenggara negara 3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	1. Tersusunnya Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara tentang keadilan dan kesetaraan gender 3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender baik di tingkat pusat maupun daerah	Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender	V	V	V	V	Kemen PP & PA, Kemenkumham, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>4. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender bagi aparat penegak hukum</p> <p>5. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender</p>	<p>4. Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kesetaraan dan keadilan gender</p> <p>5. Adanya rekomendasi mencabut/merevisi peraturan perundang-undangan yang masih bias gender</p>						

2. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan 2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam jabatan publik 3. Optimalisasi kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan dalam jabatan publik	1. Meningkatnya kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan 2. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam jabatan publik 3. Terpenuhinya kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN & RB, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 57 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	Peningkatan akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB 2. Sosialisasi tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	Terpenuhinya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	V	V	V	V	Kemenkes, Kemen PP & PA, Kemenag, Kemenkumham, BKKBN, Kemendagri, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak	Peningkatan upaya pencegahan KDRT dan pelayanan serta perlindungan korban terutama terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang Penghapusan KDRT kepada aparaturnya dan masyarakat Peningkatan pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang Penghapusan KDRT Meningkatnya pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga 	Berkurangnya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kepolisian, Kejaksaan, Sekretariat Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
5	Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak	Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO	1. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO	Berkurangnya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.	V	V	V	V	Kemen PP & PA, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham,

2. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2. Pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang</p> <p>3. Pemerintah daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah</p>	<p>2. Tersusunnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai program, kegiatan, serta teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang</p> <p>3. Terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah</p>						<p>Kemendagri, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota</p>

4. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 60 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Melaksanakan aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak 5. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO 6. Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO	4. Terlaksananya aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak 5. Meningkatnya penindakan terhadap pelaku TPPO 6. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO						

10. HAK ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 61 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. HAK ANAK										
1	Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak	Peningkatan perlindungan, dan pemenuhan hak ABH	1. Revisi Undang-undang tentang Pengadilan Anak yang berperspektif HAM dengan pendekatan <i>restorative justice</i> 2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif HAM anak untuk menangani ABH	1. Tersusunnya Undang-undang tentang Pengadilan Anak yang berbasis HAM dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 2. Meningkatnya pemahaman, kepekaan, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan ABH	1. Terlindunginya ABH dalam proses peradilan pidana 2. Penanganan ABH dengan pendekatan <i>restorative justice</i>	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemen PP&PA, Kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Partisipasi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan <i>restorative justice</i> yang berbasis masyarakat	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan <i>restorative justice</i> yang berbasis masyarakat						
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat	1. Melakukan pendataan terhadap anak miskin dan anak cacat 2. Program pelayanan kesehatan dasar bagi anak miskin dan anak cacat (JAMKESMAS) 3. Peningkatan kualitas gizi anak miskin dan anak cacat	1. Tersedianya data anak miskin dan anak cacat 2. Meningkatnya jumlah anak miskin dan anak cacat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar (JAMKESMAS) 3. Meningkatnya kualitas gizi anak miskin dan anak cacat	Anak miskin dan anak cacat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal	V	V	V	V	Kemendes, Kemensos, KPAI, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 63 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Peningkatan pemberian imunisasi dasar bagi balita	4. Meningkatnya imunisasi dasar balita						
3	Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	Peningkatan penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	1. Melakukan pendataan terhadap jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	1. Tersedianya data jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 2. Meningkatnya layanan kesehatan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	V	V	V	V	Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemen PP & PA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 64 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Melakukan Meningkatkan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	3. Meningkatnya keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan						
4	Belum memadainya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	Peningkatan koordinasi K/L dalam penanganan NAPZA	1. Melakukan pendataan anak korban NAPZA 2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA 3. Penyusunan program rehabilitasi anak korban NAPZA	1. Tersedianya data anak korban NAPZA 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya NAPZA 3. Tersedianya program rehabilitasi dalam penanganan anak korban NAPZA	Anak korban NAPZA mendapatkan penanganan secara terpadu	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes, Kemenag, Kemenpora, Kemen PP & PA, Kepolisian, BNN, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

5. Perlindungan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 65 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Perlindungan anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai	Penanganan perlindungan anak situasi darurat yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis secara terpadu penanganan anak dalam situasi darurat 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat 3. Melakukan pendataan anak situasi darurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak situasi darurat 2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat 3. Tersedianya data anak situasi darurat 	Terpenuhinya hak anak dalam situasi darurat secara terpadu	V	V	V	V	Kemensos, Kemendiknas, Kemen PP & PA, Kemenpora, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>4. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat</p> <p>5. Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat</p> <p>6. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat</p>	<p>4. Terlaksananya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat</p> <p>5. Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat</p> <p>6. Terlaksananya perlindungan anak dalam situasi darurat</p>						

F. PELAYANAN ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 67 -

F. PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM	Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun <i>Standard Operating Prosedur (SOP)</i> untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM 2. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya <i>Standard Operating Prosedur (SOP)</i> untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM 2. Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadakan 	Meningkatnya penanganan Komunikasi Masyarakat	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemendagri, ORI, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Mengkoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Mengkoordinasikan penanganan Komunikasi Masyarakat 4. Melakukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat	3. Terlaksananya koordinasi penanganan Komunikasi Masyarakat 4. Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Masyarakat 5. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat						

G. PEMANTAUAN...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 69 -

G. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM	1. Persiapan penyusunan pedoman : a. Penyusunan indikator implementasi RANHAM dan HAM b. Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM	1. Terbentuknya: a. Indikator implementasi RANHAM dan HAM b. Konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM	Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini serta mudah diakses	V	V	V	V	Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo, BPS, Kementerian/ Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Menyusun...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<ol style="list-style-type: none">2. Menyusun pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM3. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi HAM dan RANHAM	<ol style="list-style-type: none">2. Tersedianya pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM3. Dipahaminya pedoman pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi HAM dan RANHAM						

4. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>4. Melakukan pengumpulan data administratif (data sekunder) dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei</p> <p>5. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM</p> <p>6. Menyiapkan Informasi HAM berbasis peta Indonesia</p>	<p>4. Tersedianya Data hasil pengumpulan data administrasi dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei</p> <p>5. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM</p> <p>6. Tersedianya Informasi HAM berbasis peta Indonesia</p>						

7. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7. Melakukan evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM 8. Menyampaikan laporan implementasi RANHAM kepada Panitia RANHAM	7. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM 8. Tersedianya laporan implementasi RANHAM						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd.

Bistok Simbolon